



Pusat Studi Pentakosta Indonesia

JURNAL PENTAKOSTA INDONESIA

Vol 03, No 02, November 2023;

ISSN 2797-7676 (online); 2797-717X (print)

Available at: pspindonesia.org

Peran Gembala Sidang dalam Mewujudkan Pendidikan Politik bagi Warga Gereja

Yonatan Alex Arifianto¹

arifianto.alex@gmail.com

Abstract

In Christianity which is practiced by believers, its existence cannot be separated from political agendas and practical politics. Because politics is something that aims to build the nation, but sometimes politicians also use various ways beyond reason to seize power. So politics in the church must be separated within the scope of church ministry where the church is a spiritual institution that aims to educate church members to live according to Biblical truths. But politics is also a means for spirituality to educate so that congregation members can understand political paradigms and goals. Using a descriptive qualitative method with a literature study approach, it can be concluded, that firstly, the role of the pastor in realizing political education for church members is a priority and important. Second, the pastor of the congregation can facilitate workshops and training or teaching in the political education curriculum, provide political teaching and political enlightenment, and guide his people in Christian life according to the Bible. Third, the Church and the pastoral leadership can also play a role in politics by setting a moral example for their people and defending truth and justice in politics. Because political education aims to increase public awareness of their rights and obligations in the life of the nation and state.

Keywords: *Pastor, Practical Politics, Political Education, Church Citizens.*

Abstrak

Kekristenan sebagai bagian kehidupan orang percaya memang keberadaannya tidak lepas dari agenda politik dan politik praktis. Sebab politik merupakan sesuatu yang bertujuan membangun bangsa, namun kadang kala para politisi juga melakukan berbagai cara diluar nalar untuk merebut kekuasaan. Maka politik dalam gereja harus dipisahkan dalam ruang lingkup pelayanan gereja dimana gereja adalah lembaga kerohanian yang bertujuan mendidik warga gereja untuk hidup sesuai dengan kebenaran Alkitabiah. Namun politik juga menjadi sarana bagi kerohanian untuk mendidik supaya warga jemaat dapat memahami paradigma dan tujuan politik. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka maka dapat disimpulkan, pertama peran gembala sidang dalam mewujudkan pendidikan politik bagi warga gereja sangat menjadi prioritas dan penting. Kedua, gembala sidang dapat memfasilitasi workshop maupun pelatihan dalam pengajaran di kurikulum pendidikan politik, memberikan pengajaran politik dan pencerahan politik, serta membimbing umatnya dalam hidup Kristen sesuai dengan Alkitabiah. Ketiga, Gereja dan kepemimpinan gembala sidang juga dapat berperan dalam politik dengan menjadi teladan moral bagi umatnya dan membela kebenaran dan keadilan dalam politik. Sebab pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta membawa kerohanian yang terus dewasa.

Kata kunci: *Gembala Sidang, Politik Praktis, Pendidikan Politik, Warga Gereja.*

¹ Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala, Salatiga

PENDAHULUAN

Agama dan politik dalam perannya untuk membangun bangsa yang terjadi selama ini saling membutuhkan dan dapat saling mendukung.¹ Agama dan segala ajarannya dapat menjadi pondasi atau dasar serta nilai, norma dalam politik. Oleh sebab itu agama memiliki peran dan juga cara strategis dalam mengkonstruksi bahkan konsep terkait kerangka nilai serta norma dalam seluruh masyarakat, dan tentunya juga negara menggunakan agama sebagai legitimasi pengajaran bersifat dogma untuk mengikat masyarakat dan seluruh praktisi politik agar mematuhi aturan yang ada dalam mewujudkan politik yang bersih dan damai. Dalam kekristenan keberadaan politik merupakan sesuatu yang harus dipisahkan dalam ruang lingkup pelayanan gereja dimana gereja adalah lembaga kerohanian yang bertujuan mendidik warga gereja untuk hidup sesuai dengan kebenaran Alkitabiah. Namun politik juga menjadi sarana bagi kerohanian untuk mendidik supaya warga jemaat dapat memahami paradigma dan tujuan politik.

Negara Republik Indonesia yang menghargai keberagaman merupakan negara yang menganut sistem politik yang berlandaskan ideologi pada dasar negara yaitu Pancasila, oleh sebab itu pendidikan politik sangat berharga dan wajib disampaikan kepada para generasi muda dan para politisi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman sekaligus pendoktrinan tentang sistem politik yang diterapkan di Indonesia.² Dan tentunya gereja yang sudah memahami bahwa keberadaannya dapat memberikan pemahaman akan pentingnya politik yang dapat meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki moralitas dan integritas dalam menjalankan politik praktisnya. Maka gereja bertanggung jawab terhadap jemaatnya supaya memiliki nalar dan kemanusiaan yang berjiwa menghormati dan menghargai sesamanya seperti yang diungkapkan dalam Alkitab 1 Pet 2:17 dimana rasul Petrus meminta untuk menghormati semua orang. Yaitu dengan adanya pendidikan politik bagi warga gereja yang mana pendidikan politik merupakan sebuah upaya edukasi yang sistematis dan terencana untuk membentuk individu yang sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang dapat bertanggung jawab secara moral dalam mewujudkan tujuan politiknya.³ Walaupun wadah perpolitikan adalah partai politik namun peran pendidikan

¹ Kana Lailatul Ahadiyah and others, "Relasi Sosial Antara Kyai Non Politik Dan Kyai Politik Di Komunitas Religius Pedesaan" (Universitas Airlangga, 2018).

² Almi Nurdinar et al., "Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Kepemimpinan Peserta Didik Pada Organisasi Kesiswaan Di Sma Pasundan Cikalongkulon," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2020).

³ Bin Hasyim, Nurbudiwati Sartibi, and Hasbi Shiddiq Fauzan, "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum," *Budaya Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 1–6, www.lanmas.fisip.uniga.ac.id.

politik juga merupakan alat untuk meningkatkan partisipasi politik,⁴ baik secara individu maupun partisipasi dalam masyarakat.⁵ Memang diakui pelaksanaan pendidikan politik tidak selalu berjalan dengan lancar, seringkali ada kendala-kendala, seperti adanya pandangan negatif masyarakat terhadap partai politik.⁶ Namun dalam melaksanakan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat adalah seringkali masyarakat bersikap skeptis terhadap partai politik.⁷ Walaupun kehadiran partai politik di alam demokrasi banyak menghadirkan mosi tidak percaya oleh masyarakat luas. Tidak salah, bila ada yang menilai hal ini dampak dari sistem politik Indonesia yang memiliki kecenderungan memposisikan partai politik sebagai aktor utama dalam berdemokrasi.⁸ Namun tentunya tujuan utama yang harus dikerjakan adalah pendidikan politik yang diterapkan haruslah mampu membangkitkan semangat kebangsaan, memperkuat kesadaran ideologis, dan membentuk perilaku warga bangsa sesuai dengan ideologi bangsa.⁹ Memang untuk masuk dan menjadi bagian dari kemajuan pemerintah umat Tuhan harus berada dalam keberadaan politik yang mana hal itu merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan.¹⁰

Pembahasan mengenai aktualisasi gembala sidang dalam mewujudkan pendidikan politik bagi warga gereja telah dilakukan dalam berbagai diskusi dan dituangkan ke dalam literatur-literatur dalam berbagai karya di literature Kristen. Salah satu kajian mengenainya ditulis oleh Alvary Exan Rerung dan Juliati Attu dalam artikel yang mengupas tentang sikap gereja terhadap partisipasi politik dan relevansinya bagi gereja Toraja Mamasa jemaat Sapankale.¹¹ Kajian ini disusun untuk memberikan petunjuk bahwa gereja sebagai perkumpulan orang percaya, harus (wajib) mendampingi warga gerejanya dalam

⁴ Luqman Adi Prasetyo, "Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Islam Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kabupaten Purbalingga," *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto* 05, no. 1 (2021): 123–35.

⁵ Aprillio Poppy Belladonna, "Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Wahana Pendidikan Politik Di Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2018): 31–42, <https://journal.ikipgriptk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/31-42>.

⁶ Ilmar Andi Achmad, "Pelaksanaan Pendidikan Politik Sebagai Program Pendidikan Nonformal (Study Kasus Di Partai Keadilan Sejahtera)," *Journal of Education Sciences* 1, no. 1 (2022): 27–38.

⁷ Roman Hadi Saputro, "Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang," *Journal Civics & Social Studies* 5, no. 1 (2021): 147–57, <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.1222>.

⁸ Putri Handayani Nurdin, "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik," *Jambura Law Review* 1, no. 2 (2019): 144–66, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1977>.

⁹ Elisabeth Sitepu, "Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Research Sains* 2, no. 1 (2016): 1–8.

¹⁰ Asmika Rahman, "Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 44–52, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8385>.

¹¹ Alvary Exan Rerung and Juliati Attu, "Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale," *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat* 4, no. 1 (2023): 1–17.

memberikan wejangan untuk menjalankan pesta demokrasi yang baik, agar terhindar dari politik kotor yang dapat menimbulkan masalah disharmoni hingga perpecahan pada gereja. Kajian lain dilakukan oleh *Yohanes Krismantyo Susanta* yang mengupas tentang orang Kristen dan politik: belajar dari kasus Salomo dan Adonia dalam persaingan menuju takhta.¹² Kajian ini menarik kesimpulan bahwa untuk menyikapi tahun politik, orang Kristen diajak untuk kembali memahami politik secara benar, sehingga tak jatuh pada politik praktis yang menggunakan segala macam cara termasuk menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian dan menyingkirkan lawan politik untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa kajian yang telah ada belum terdapat pembahasan secara khusus mengenai gembala sidang dalam mewujudkan pendidikan politik, Mengingat bahwa gembala berperan penting bagi warga gerejanya untuk memiliki integritas dan moralitas dalam membangun manusia yang berpolitik bebas dari politik uang, politik saling menjatuhkan. Namun kenetralan gembala adalah bukti dimana gembala mengedepankan keorhanian bagi jemaat untuk dewasa dalam berpolitik. Oleh karena itu gembala mengintruksikan di platform digital media sosial, warga gereja yang terlibat politik praktis tidak boleh melakukan kampanye hitam dan kejahatan politik lainnya. Dengan demikian pelaksanaan aktualisasi gembala sidang dalam mewujudkan pendidikan politik dapat menjadi jawaban bagi gereja dan warga gereja untuk membawa kekristenan menjadi terang dalam lingkup dunia politik.

METODE

Artikel ini disusun dengan maksud untuk menggali aktualisasi gembala sidang dalam kaitannya memberikan paradigma dan pengajaran kepada warga gereja untuk melek politik. Oleh karenanya metode yang dipergunakan untuk menyusun artikel ini adalah deskriptif kualitatif. Hal itu sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Creswell bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif di mana hal kajiannya ditentukan karena peneliti mendalami proses, makna, dan pemahaman yang diperoleh melalui uraian kata-kata.¹³ Sesuai dengan tujuan tersebut, pembahasan awal dilakukan dengan menggali peran gembala dan juga perannya dalam kepemimpinannya di dunia politik, selanjutnya penulis menarasikan pendidikan Politik sesuai nilai Alkitabiah yang menjadi acuan bagi gembala

¹² Yohanes Krismantyo Susanta, "Orang Kristen Dan Politik: Belajar Dari Kasus Salomo Dan Adonia Dalam Persaingan Menuju Takhta," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2019): 22–36.

¹³ Magnan Sally Sieloff and John W. Creswell, "Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches," *The Modern Language Journal* 81, no. 2 (2006): 256.

sidang untuk memujudkan pendidikan politik yang selaras dengan norma dan hukum. Sumber data penelitian ini digali dari berbagai literatur Kristen maupun literatur umum berupa artikel jurnal OJS, buku-buku, berita, ulasan dalam website, artikel umum dan literatur lainnya yang sesuai dengan topik pembahasan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gembala dan Peran Kepemimpinannya dalam Politik

Makna gembala dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memberikan arti sebagai penjaga atau pemelihara hewan ternak, atau makna lainnya yang berarti, gembala diartikan sebagai penjaga keselamatan atau memberi perlindungan kerohanian orang banyak.¹⁴ Sesuai dengan maknanya sebagai penjaga dan pemelihara, seorang pemimpin Kristen dalam artikel ini terkait gembala sidang dituntut untuk dapat menjalankan fungsi tersebut dengan dedikasi dan juga penuh tanggung jawab terhadap panggilan Tuhan. Oleh definisi dan makna tersebut maka pemimpin Kristen bukanlah sebagai pemimpin yang lepas dari tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan keselamatan orang yang dipercayanya. Atau gembala bukanlah pribadi dengan sikap ketidakpedulian terhadap keadaan umat Tuhan yang dipercayakan. Gembala sidang juga merupakan pimpinan untuk menggembalakan umat Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan bagi gereja lokal dimana Tuhan mempercayakan untuk menjadi kawan sekerja Allah.¹⁵ Tentunya gembala sidang juga merupakan pemimpin gereja yang bertanggung jawab atas penggembalaan jemaat atau sidang gereja dimana Tuhan sudah memilihnya. Peran penting dalam penggembalaan adalah dalam membimbing dan menuntun umatnya dalam hidup sesuai dengan iman dan teologi Kristen dan juga gembala bertanggung jawab memberikan teladan moral dan juga kehidupan yang penuh dedikasi untuk Tuhan bagi umatnya.¹⁶ Memang gembala sidang juga dapat berperan dalam politik dengan menjadi teladan moral bagi umatnya, mendorong umatnya untuk terlibat dalam politik dengan integritas dan moralitas, serta membela kebenaran dan keadilan dalam politik. Namun, gembala sidang seharusnya tidak terlibat dalam setiap politik praktis dan fokus pada pelayanan gereja namun juga ikut berperan mendidik jemaat untuk ikut dalam partisipan

¹⁴ E Setiawan, "KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019.

¹⁵ Paulus Kunto Baskoro and Yonatan Alex Arifianto, "Fungsi Manajerial Gembala Sidang Dalam Memperlengkapi Pelayanan Jemaat Lokal," *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, Dan Pendidikan* 5, no. 2 (2021): 111–26, <https://doi.org/10.51730/ed.v5i2.71>.

¹⁶ Paulus Kunto Baskoro, "Kajian Teologi Markus 10: 45 Terhadap Prinsip Pelayanan Yesus Kristus Dan Relevansinya Bagi Pemimpin Gereja Masa Kini," *Ritornera-Jurnal Teologi Pentakosta Indonesia* 2, no. 1 (2022): 39–49.

berpolitik dalam kebenaran Alkitabiah serta membimbing umatnya dalam hidup Kristen yang seturut panggilan Tuhan.

Gembala sidang memang dapat terlibat dalam politik dengan tujuan apabila gereja mengalami ketidakadilan maka gembala dapat memperjuangkan kebenaran dan keadilan, serta memastikan bahwa kuasa politik digunakan untuk kebaikan dan kepentingan umum yang lebih baik dan harus sesuai nilai dan norma Alkitabiah. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa mengacu kepada hakikat gembala secara umum, dan pengaruhnya dalam dunia politik maka pemimpin Kristen bertindak sebagai penuntun, pengarah, pendidik sekaligus sebagai role model yang dapat menggerakkan pengikut atau umat percaya untuk secara bersama-sama hidup benar dan menuju kepada tujuan utama mencapai kehidupan yang menjadi berkat, meskipun berada dalam dunia politik. Maka gembala sebagai pemimpin dalam kepemimpinan Kristen berfokus kepada segala bentuk upaya untuk mewujudkan tujuan utama yaitu memelihara umat Tuhan untuk berada dalam situasi dan kondisi yang sejalan dengan nilai dan norma Alkitabiah.

Pendidikan Politik sesuai Nilai Alkitabiah

Sebagai gembala yang juga berada sebagai warga negara, dituntut untuk memberikan pengajaran dan pendidikan politik yang mengarah kepada pembentukan karakter yang baik dalam pribadi umat Tuhan. Sebab dalam kehidupan kekristenan dewasa ini tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu pendidikan yang mampu menjadikan pribadi berkarakter baik dalam menjalankan agenda politiknya tentunya selaras dengan nilai dan kebenaran Alkitabiah. Sejatinya umat Tuhan memang memiliki hak dan tanggungjawab di dalam bergereja, seperti melayani dan menjadi berkat bagi sesama, dan tentunya umat Tuhan juga pasti memiliki hak dan tanggungjawab sebagai warga negara,¹⁷ baik dalam sisi dunia perpolitikan. Oleh sebab itu pendidikan politik bagi warga gereja harus dimulai dari gembala yang mengajarkan bahwa kekristenan berada untuk membangun kota dan mengupayakan kedamaian hal itu merupakan tanggungjawab orang percaya untuk membangun kesejahteraan kota di mana ia ditempatkan oleh Tuhan (Yer. 29:4-7 ; Rm. 13:1-7). Maka pendidikan politik dewasa ini memang sangat penting untuk diaktualisasikan bagi pemimpin gereja untuk mengembangkan konsep dan kontruks dasar-dasar atau pemahaman

¹⁷ Adolf Bastian Simamora, "Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia," *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 2, no. 1 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.36972/jvow.v2i1.16>.

secara teologis yang bisa dijadikan prinsip dan anggaran dasar bagi jemaat untuk pelayanan dalam bidang politik.¹⁸

Instrument pendidikan diharapkan gereja secara tegas harus berani menolak keras berbagai bentuk tindakan intimidasi, persekusi dan deskriminatif ataupun bentuk-bentuk kekerasan fisik maupun verbal, baik dalam aktivitas politik atau aktivitas lainnya yang bisa saja dilakukan oleh warga gereja.¹⁹ Sehingga pendidikan politik ini mengedepankan nilai keadilan yang dinyatakan bagi kemanusiaan yang harus dijunjung. Tergambar jelas di mana Alkitab sangat mengajarkan dan memberikan penekanan pentingnya sikap hidup dalam nilai keadilan yang tidak memihak sepihka namun secara sosial dan juga perlakuan yang adil terhadap semua orang harus dikedepankan. Pendidikan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Alkitabiah harus mempromosikan dan menempatkan nilai keadilan, nilai menghormati martabat manusia, dan juga nilai melindungi hak-hak individu tanpa memandang status sosial atau latar belakang SARA.

Pendidikan politik dalam kajian yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma ajaran Alkitabiah tentunya harus mendorong para pemimpin politik untuk melayani masyarakat dengan tulus dan tanpa motif pribadi atau tujuan dari agenda mementingkan diri sendiri atau golongan yang egois. Sebab dalam Filipi 2:3, dikatakan bahwa: *Apa pun yang kamu lakukan, janganlah mementingkan kepentinganmu sendiri atau menonjolkan diri. Utamakanlah kepentingan setiap saudara ...*" karena mementingkan diri sendiri mendatangkan kekacauan dan keonaran dan memunculkan segala perbuatan jahat (Yak 3:16). Seperti yang diungkapkan oleh Paulus dalam 2 Timotius 3:2: *"Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, dan juga tidak boleh mencari kepentingan sendiri (Filipi 2:2-4)*. Oleh karena itu dalam politik merupakan sesuatu yang baik, sebab bertujuan untuk menciptakan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu bangsa. Politik menjadi tidak baik sebab usaha-usaha yang dilakukan dalam berpolitik tidak lagi berorientasi pada kepentingan masyarakat, melainkan untuk kepentingan individu saja.²⁰

¹⁸ Zakaria J. Ngelow, "Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia," *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014): 213–22, <https://doi.org/10.25278/jj71.v12i2.16>.

¹⁹ Zakaria J. Ngelow, *Teks Dan Konteks Yang Tiada Bertepi* (Yogyakarta: Pustaka Muria, 2012), 184.

²⁰ Rerung and Attu, "Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale."

Selain tidak egois, pendidikan politik yang harus ditanamkan bagi jemaat adalah sikap pendidikan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Alkitabiah harus mengedepankan kejujuran dalam komunikasi politik dan menolak praktek-praktek manipulatif atau ketidakjujuran, seperti KKN, Politik uang dan kampanye hitam yang menjelekan lawan atau kawan kompetisi dalam pemilihan Caleg maupun Pilkada. Sebab kejujuran atau hidup dalam integritas juga dinyatakan dalam Alkitab sebagai standart dan dasar dalam berpolitik. Sebab Alkitab adalah hukum yang benar dan adalah keadilan yang kekal seperti yang diungkapkan oleh pemazmur Mazmur 119:142: "*Keadilan-Mu adalah keadilan yang kekal, dan hukum-Mu adalah kebenaran.*" Di kitab Amsal 11:11 dituliskan bahwa "*Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya.*" Amsal 11:3 "*Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya.* Bahkan dalam kisah Ayub kejujuran dijunjung tinggi. Ayub 8:6 "*Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu.*" Sebab kejujuran yang diterapkan itu membawa kasih kepada sesama karena fakta dan kebenaran adalah bagian dari realitas hidup yang harus dijunjung tinggi. Sehingga kejujuran itu akan sangat mendukung bagi pembangunan. Oleh karena itu prinsip kejujuran disegala bidang harus diaktualisasikan maka umat Tuhan akan bertanggung jawab terhadap anggaran, jabatan dan kekuasaan yang harus dikerjakan dengan benar, sebab akan mensejahterakan masyarakat.

Oleh karena itu pendidikan politik yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Alkitabiah harus mendorong keterlibatan politik yang bijak dan penuh hikmat dimana umat Tuhan yang masuk dalam dunia politik untuk menghormati hukum dan tata kelola yang ada. Bertujuan membawa semangat persatuan, dimana hukum menjadi panglima keadilan.

Aktualisasi Gembala Memujudkan Pendidikan Politik Yang Selaras dengan Norma dan hukum

Para pemimpin gereja atau gembala sidang adalah pemimpin yang diberi tanggung jawab untuk membawa umat Tuhan hidup benar dihadapan Tuhan. Sebagai bagian dari kawan sekerja Allah, gembala dituntut untuk dapat menjadi terang dan berkat bagi sesama. Membawa terang juga bagi pemerintah dengan memberikan masukan bagi pemerintah untuk memimpin bangsa dan agenda politiknya sebagaimana mestinya haruslah dilakukan dengan cara yang baik, benar dan memanusiakkan serta kesadaran dalam demokrasi Pancasila tentunya hal itu tidak melanggar norma dan etis teologis Kristen serta hukum yang berlaku. Terlebih gembala sidang dan kepemimpinannya menolak keras kekerasan dalam bentuk apapun dan menjunjung tinggi kedamaian bagi semua makhluk. Begitupun ketika hendak

menyampaikan aspirasi sebagai bentuk alarm pengingat bagi pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya.²¹ Aktualisasi gembala dalam mewujudkan pendidikan politik dapat juga dilakukan dengan adanya pembinaan kepada umat Tuhan terkait konsep dan aspek politik agar mereka juga tahu tentang dinamika serta perkembangan aktivitas politik yang ada, dengan tujuan membuat mereka mengerti tentang partisipasi politik yang benar sesuai dengan nilai Alkitabiah.²²

Gereja diharapkan mampu memberikan hak dan kebebasan kepada jemaat yang dipercayakan untuk aktif dalam partai politik tertentu yang sesuai dengan kultur demokrasi Pancasila dan nilai kebenaran Alkitabiah. Tentunya pemimpin gereja berani memiliki integritas untuk tidak memihak kepada salah satu partai tertentu, yang terkait SARA. Dan pemimpin gereja juga tidak boleh memihak kepada calon-calon legislatif dimana hal itu dapat membawa perpecahan bila di dalam gereja ada beberapa orang yang ikut mejadi partisipan politik praktis, yang harus dilakukan gereja dengan maksimal adalah memberikan pemahaman dan paradigma yang baru kepada umat Tuhan untuk dapat memilih sesuai dengan apa yang telah dipelajari dan sesuai dengan keyakinan dan hati nurani, dengan syarat mana yang diyakini oleh mereka dapat menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat dan gereja itu sendiri tentunya.²³

Pemimpin gereja harus mulai berperan untuk mendidik umat supaya “melek” politik dan memahami prinsip-prinsip politik yang sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Dimana indikator masyarakat melek politik, memiliki pemahaman yang baik terhadap budaya dan hal-hal yang terkait politik.²⁴ Karena perlunya pendidikan politik yang lebih baik dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini dimana hoak dan agenda politik yang sangat menyimpang dipertontonkan dengan jelas oleh politikus.²⁵ Maka dengan adanya pendidikan politik yang benar memberikan keberanian bagi gereja dan kepemimpinannya secara tegas menghimbau anggota jemaat untuk menolak kotor seperti kampanye hitam dan politik uang. Oleh karena itu, gereja tidak boleh menerima sumbangan dari suatu partai politik atau para calon jika tujuannya hanya untuk membeli suara anggota jemaat secara halus dan menjebak pemilih

²¹ Rerung and Attu.

²² Rerung and Attu.

²³ Rerung and Attu.

²⁴ Siti Hajar, “Fungsi Media Dan Partai Politik Di Dalam Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif,” *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2022): 554–60, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i2.452>.

²⁵ Khoiruddin Bashori, “Pendidikan Politik Di Era Disrupsi,” *Sukma: Jurnal Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 287–310, <https://doi.org/10.32533/02207.2018>.

untuk mendukung agenda politik kotornya.²⁶ Sebab siapapun yang menginginkan kursi politik dalam pemerintahan atau kekuasaan harus mendapat suara pemilih terbanyak.²⁷

Gembala sidang juga dapat memberikan pengajaran politik kepada umatnya agar mereka dapat berpartisipasi dalam politik dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Sejatinya pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁸ Dengan melihat kondisi sejarah perkembangan politik saat ini yang dimulai dengan politik identitas maka gembala juga perlu menyampaikan untuk menjaga kemanusiaan yang harus diperjuangkan dengan menyingkirkan perbedaan SARA. Supaya hal itu warga gereja sebagai warga negara tidak dibodohi dan tidak menjadi target politikus jahat sehingga warga gereja bertindak salah dalam aktualisasi hak politiknya. Sebab sebagai warga negara dalam bertindak maka warga gereja berhak menerima pendidikan politik yang sesuai dengan agama dan menjunjung perbedaan demi persatuan. Oleh sebab itu masalah pendidikan politik dan juga dalam bermasyarakat yaitu pendidikan kewarganegaraan bagi suatu negara merupakan proses pembinaan, penanaman, dan pewarisan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan yang diselenggarakan dalam lingkungan di mana umat Tuhan menerima pendidikan, karena pendidikan dalam konteks sumber daya manusia sangat dipandang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan manusia dan bangsa.²⁹ Dimana ranah terhadap pendidikan politik diarahkan dengan bertujuan membangun rasa nasionalisme yang tentunya membangun manusia yang memiliki integritas sebagai makhluk sosial yang berada dalam komunal. Oleh sebab itu pendidikan politik perlu masuk kedalam pendidikan kebangsaan, yaitu pendidikan yang mampu membangkitkan semangat persatuan dan kebangsaan, memperkuat kesadaran akan ideologis bangsa yang disepakati oleh bapak-bapak pendiri bangsa, hal itu bertujuan untuk membentuk perilaku warga bangsa sesuai dengan ideologi bangsa.³⁰ Sehingga dengan pendidikan politik, hal itu dapat memberikan nuansa yang benar berbeda, dan juga wawasan, dan argumentasi bagi warga masyarakat atas pilihannya untuk

²⁶ Rerung and Attu, "Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale."

²⁷ Amalia Syauket, "Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022): 47–56, <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1052>.

²⁸ Maya Nur & Agustin and Maya Mustika Kartika Sari, "Partisipasi Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo Dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 3, no. 4 (2016): 1073–88.

²⁹ Iyep Candra Hermawan, "Revitalisasi Pendidikan Politik Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia," *Jurna Kajian Pendidikan* Vol.3(1), no. 1 (2013): 9–26, <https://mindamas-journals.com/atikan/article/view/141>.

³⁰ Sitepu, "Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat."

tetap bersikap menghormati dan menghargai.³¹ Hal itu harus dikerjakan dengan membangun kebersamaan dan juga merupakan upaya yang sistematis dan keberlanjutan membawa perubahan paradigma dalam pendidikan politik.³² Dengan mencari dan mengajar orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai bagian turut berpartisipasi dalam kontestasi politik.³³ Maka umat Tuhan juga diminta untuk memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga dapat memiliki pengontrolan diri terhadap radikalisme yang mengancam politik yang penuh dengan kedamaian.³⁴

Gembala juga dapat memberikan mandat atau mengintruksikan peraturan yang tepat bagi aktivis gereja atau kekristenan untuk dapat lebih bijak dalam memisahkan politik dari pelayanan gereja: sejatinya gembala sidang seharusnya tidak terlibat dalam politik praktis, karena gereja bukanlah organisasi politik atau lembaga politik. Dan tentunya gembala juga tidak memudahkan atau memberi fasilitas kepada umat Tuhan yang terlibat politik praktis menggunakan bangunan fisik gereja untuk kampanye dan agenda politik. Sebab gedung gereja serta ibadah gerejawi hanya diindahkan untuk memberi wejangan kepada anggota jemaat tentang partisipasi politik dan tidak boleh dijadikan sarana kampanye oleh para calon.³⁵ Gereja juga dapat berperan dalam mewujudkan pendidikan politik bagi warga gereja dengan melakukan pelatihan fasilitator modul pendidikan politik, mendidik umat supaya melek politik, memberikan pencerahan politik, dan memisahkan politik dari pelayanan gereja. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan politik bagi warga gereja dan gembala sidang dapat memfasilitasi pendidikan politik tersebut. Sebab orang percaya juga diizinkan untuk menjadi berkat sebagai terang dan garam ditengah politik supaya nama Tuhan dipermuliakan dengan mendasari diri dalam pemahaman atau paradigma yang selaras

³¹ Iyep Hermawan, Candra, "Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia," *Jurnal.Unsur.Ac.Id* 10, no. 1 (2020): 19–30, <https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/939>.

³² Mirza Hardian et al., "Gagasan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda (Sebuah Kajian Literatur)," *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 6, no. 3 (2021): 552, <https://doi.org/10.28926/briliant.v6i3.653>.

³³ Payerli Pasaribu, "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 5, no. 1 (2017): 51–62, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>.

³⁴ Hilal Ramdhani, "Studi Komparatif Kurikulum Pendidikan Politik Di Perguruan Tinggi," *Prosiding Senas POLHI Ke-2 Tahun 2019*, 2019, 79–85, <https://www.publikasiilmiah.unwas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/view/2967%0Ahttps://www.publikasiilmiah.unwas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/download/2967/2885>.

³⁵ Rerung and Attu, "Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale."

dengan kebenaran Alkitabiah dan tentunya dalam berpolitik dan bernegara harus berlandaskan Firman Allah.³⁶

KESIMPULAN

Gembala atau pemimpin Kristen dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan seharusnya tidak terlibat dalam politik praktis, karena gereja bukanlah organisasi politik atau lembaga politik. Oleh sebab itu untuk menunjukkan bagaimana pentingnya gembala dan peran kepemimpinannya terhadap politik dan pendidikan politik bagi warga gereja yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama peran gembala sidang dalam mewujudkan pendidikan politik bagi warga gereja sangat menjadi prioritas dan penting. Kedua, gembala sidang dapat memfasilitasi workshop maupun pelatihan dalam pengajaran di kurikulum pendidikan politik, memberikan pengajaran politik dan pencerahan politik, serta membimbing umatnya dalam hidup Kristen sesuai dengan Alkitabiah. Ketiga, Gereja dan kepemimpinan gembala sidang juga dapat berperan dalam politik dengan menjadi teladan moral bagi umatnya dan membela kebenaran dan keadilan dalam politik. Sebab pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

REFERENSI

- Achmad, Ilmar Andi. "Pelaksanaan Pendidikan Politik Sebagai Program Pendidikan Nonformal (Study Kasus Di Partai Keadilan Sejahtera)." *Journal of Education Sciences* 1, no. 1 (2022): 27–38.
- Agustin, Maya Nur &, and Maya Mustika Kartika Sari. "Partisipasi Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo Dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 3, no. 4 (2016): 1073–88.
- Ahadiyah, Kana Lailatul, and others. "Relasi Sosial Antara Kyai Non Politik Dan Kyai Politik Di Komunitas Religius Pedesaan." Universitas Airlangga, 2018.
- Arifianto, Yonatan Alex, and Aji Suseno. "Filsafat Politik Dan Praktisnya Dalam Persepektif Iman Kristen." *Jurnal Antusias* 6, no. 2 (2021): 76–91.
- Bashori, Khoiruddin. "Pendidikan Politik Di Era Disrupsi." *Sukma: Jurnal Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 287–310. <https://doi.org/10.32533/02207.2018>.
- Baskoro, Paulus Kunto. "Kajian Teologi Markus 10: 45 Terhadap Prinsip Pelayanan Yesus Kristus Dan Relevansinya Bagi Pemimpin Gereja Masa Kini." *Ritornera-Jurnal Teologi Pentakosta Indonesia* 2, no. 1 (2022): 39–49.
- Baskoro, Paulus Kunto, and Yonatan Alex Arifianto. "Fungsi Manajerial Gembala Sidang Dalam Memperlengkapi Pelayanan Jemaat Lokal." *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, Dan Pendidikan* 5, no. 2 (2021): 111–26. <https://doi.org/10.51730/ed.v5i2.71>.

³⁶ Yonatan Alex Arifianto and Aji Suseno, "Filsafat Politik Dan Praktisnya Dalam Persepektif Iman Kristen," *Jurnal Antusias* 6, no. 2 (2021): 76–91.

- Belladonna, Aprillio Poppy. "Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Wahana Pendidikan Politik Di Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2018): 31–42. <https://journal.ikipgriptk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/31-42>.
- Hajar, Siti. "Fungsi Media Dan Partai Politik Di Dalam Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2022): 554–60. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i2.452>.
- Hardian, Mirza, Yayuk Hidayah, Anis Suryaningsih, and Yoga Ardian Feriandi. "Gagasan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda (Sebuah Kajian Literatur)." *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 6, no. 3 (2021): 552. <https://doi.org/10.28926/briliant.v6i3.653>.
- Hasyim, Bin, Nurbudiwati Sartibi, and Hasbi Shiddiq Fauzan. "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum." *Budaya Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 1–6. www.lanmas.fisip.uniga.ac.id.
- Hermawan, Candra, Iyep. "Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia." *Jurnal.Unsur.Ac.Id* 10, no. 1 (2020): 19–30. <https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/939>.
- Hermawan, Iyep Candra. "Revitalisasi Pendidikan Politik Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia." *Jurna Kajian Pendidikan* Vol.3(1), no. 1 (2013): 9–26. <https://mindamas-journals.com/atikan/article/view/141>.
- Ngelow, Zakaria J. *Teks Dan Konteks Yang Tiada Bertepi*. Yogyakarta: Pustaka Muria, 2012.
- . "Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia." *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014): 213–22. <https://doi.org/10.25278/jj71.v12i2.16>.
- Nurdin, Putri Handayani. "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik." *Jambura Law Review* 1, no. 2 (2019): 144–66. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1977>.
- Nurdinar, Almi, Iyep Candra Hermawan, Banan Sarkosih, and Universitas Suryakencana. "Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Kepemimpinan Peserta Didik Pada Organisasi Kesiswaan Di Sma Pasundan Cikalongkulon." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2020).
- Pasaribu, Payerli. "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 5, no. 1 (2017): 51–62. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>.
- Prasetyo, Luqman Adi. "Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Islam Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kabupaten Purbalingga." *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto* 05, no. 1 (2021): 123–35.
- Rahman, Asmika. "Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 44–52. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8385>.
- Ramdhani, Hilal. "Studi Komparatif Kurikulum Pendidikan Politik Di Perguruan Tinggi." *Prosiding Senas POLHI Ke-2 Tahun 2019*, 2019, 79–85. <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/view/2967%0Ahttps://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/download/2967/2885>.
- Rerung, Alvary Exan, and Juliati Attu. "Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale." *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat* 4, no. 1 (2023): 1–17.
- Saputro, Roman Hadi. "Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang." *Journal Civics & Social Studies* 5, no. 1 (2021): 147–57.

- <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.1222>.
- Setiawan, E. "KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019.
- Sieloff, Magnan Sally, and John W. Creswell. "Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches." *The Modern Language Journal* 81, no. 2 (2006): 256.
- Simamora, Adolf Bastian. "Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia." *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 2, no. 1 (2019): 1–15. <https://doi.org/10.36972/jvow.v2i1.16>.
- Sitepu, Elisabeth. "Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Research Sains* 2, no. 1 (2016): 1–8.
- Susanta, Yohanes Krismantyo. "Orang Kristen Dan Politik: Belajar Dari Kasus Salomo Dan Adonia Dalam Persaingan Menuju Takhta." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2019): 22–36.
- Syauket, Amalia. "Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022): 47–56. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1052>